



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG .
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

dicap dan ditandatangani

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

NOMOR : 06 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Sumedang	- Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah - Pengaturan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi bidang kesehatan yang bersifat khusus - Peningkatan status kelembagaan kesbangpol.	-	√	- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 - Permendagri Nomor 11 Tahun 2019	-	√	Bagian Organisasi Setda	2021	Perubahan atau pembentuk an perda baru.
2.	Peraturan Daerah	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023	Adanya perubahan kebijakan nasional yaitu Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020, Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, & Permendagri No.90 Tahun 2019.	-	√	Permendagri 86 Tahun 2017	-	√	Bappppeda	2021	
3.	Peraturan Daerah	Percepatan Sanitasi Berbasis Masyarakat	1. Maksud dan Tujuan 2. Pilar STBM 3. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam STBM	√	-		√	-	Dinkes	2021	
4.	Peraturan Daerah	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Narkotika dan Prekursor Narkotika	1. Asas dan tujuan 2. Tugas dan Wewenang 3. Pemerintah Daerah 4. Antisipasi Dini 5. Pencegahan 6. Penanganan 7. Rehabilitasi 8. Partisipasi Masyarakat.	√	-		√	-	Kesbangpol	2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
5.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan 2. Kesejahteraan Sosial 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial 5. Penjangkauan social terhadap PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial 6. Rehabilitasi social Perlindungan social pemberdayaan sosial 7. Penanggulangan kemiskinan. 8. Sumberdaya manusia bidang kesejahteraan social. 9. Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan social. 10. Standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan social. 11. Data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan social. 12. Pemberian penghargaan. 13. Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.	√	-	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009	√	-	DinsosP3A	2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			14. Kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social. 15. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan social. 16. Sanksi administrative.								
6.	Peraturan Daerah	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	-	√	BPKAD	2021	
7.	Peraturan Daerah	Perpustakaan	1. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 2. Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.	√	-	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007	√	-	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	2021	
8.	Peraturan Daerah	Keolahragaan	1. Pembudayaan keolahragaan. 2. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan. 3. Penelusuran, Pengembangan, dan Pembinaan Bibit Unggul Olahragawan Daerah. 4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Keolahragaan. 5. Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah dengan Organisasi Olah Raga. Di daerah.	√	-	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005	√	-	Disparbud-pora	2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			6. Dukungan untuk Pelaku Olah raga dan Tenaga Keolahragaan untuk Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan 7. Pengembangan Usaha/Industri Bidang Keolahragaan. 8. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah raga. 9. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan.								
9.	Peraturan Daerah	Kepemudaan	1. Pelayanan Kepemudaan 2. Pengembangan kepemimpinan Pemuda	√		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.	√	-	Disparbudp ora		
10.	Peraturan Daerah	Rencana Detail Tata Ruang Ujung Jaya	1. Pengaturan Pola Ruang Kecamatan Ujungjaya. 2. Pengaturan Struktur Ruang Kecamatan Ujungjaya. 3. Peraturan Zonasi Kecamatan Ujungjaya.	√	-	Perda Nomor 4 Tahun 2018	√	-	Dinas PUPR	2021	
11.	Peraturan Daerah	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan RuangLingkup 3. Perencanaan dan Penetapan. 4. Pengembangan 5. Pemanfaatan 6. Pembinaan 7. Pengendalian 8. Pengawasan 9. Informasi	√	-	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Perda 4 Tahun 2018	√	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan-Pangan	2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 11. Peran Serta Masyarakat 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan.								
12.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	1. Penugasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan kepada desa, 2. Pendaftaran pindah dating. 3. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. 4. Penerbitan kartu identitas anak. 5. Pencatatan kelahiran. 6. Perlindungan data dan dokumen kependudukan. 7. Blangko dokumen. 8. Sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Pencabutan dan pembatalan dokumen kependudukan.	-	√	Perpres Nomor 96 Tahun 2018	-	√	Disdukcapil	2021	
13.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang.	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Modal dasar, Pembinaan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017			Bagian Ekonomi	2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
14.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Sumedang pada PT.Lembaga Keuangan Mikro Sumedang.	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Modal dasar, Pembinaan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017			Bagian Ekonomi	2021	
15.	Peraturan Daerah	Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMD Kabupaten Sumedang	Pendirian dan Pengelolaan BUMD	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017		√	Bagian Ekonomi	2021	Pencabutan atau pembentukan perda baru
16.	Peraturan Daerah	Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemda Kabupaten kepada Pihak Ketiga	Pencabutan Pemberlakuan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		√	Bagian Ekonomi	2021	
17.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.	Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang.	√		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014	√		DKPP	2021	
18.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Pengharmonisasian Peraturan Daerah oleh Instansi Vertikal dan Menghapus ketentuan Peraturan Bersama Bupati		√	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Permendagri nomor 120 tahun 2018		√	Bagian Hukum	2021	
19.	Peraturan Daerah	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.		√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009		√	Bapenda	2021	
20.	Peraturan Daerah	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Struktur Tarif Parkir Berlangganan.		√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009		√	Bapenda	2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
DAFTAR KUMULATIF TERBUKA											
21.	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020		√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	-	√	BPKAD	2021	
22.	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	-	√	BPKAD	2021	
23.	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	-	√	BPKAD	2021	
DAFTAR HAK INISIATIF											
24.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren	- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pondok pesantren. - Ruang lingkup penyelenggaraan pondok pesantren.	√	-					2021	
25.	Peraturan Daerah	Perubahan Perda No 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.	Pemberlakuan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transfortasi	√	-					2021	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampai an	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
26.	Peraturan Daerah	Penegakan Protokol Kesehatan dimasa Pandemi	- Penyebaran Informasi seluas-luasnya tentang pandemi. - Penegakan Protokol Kesehatan. - Penegakan Sanksi.	√	-					2021	
27.	Peraturan Daerah	Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.	- Retribusi rumah potong hewan. - Retribusi pasar Hewan.								

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

dicap dan ditandatangani

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001